



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan mewujudkan penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, efektif dan efisien diperlukan perhitungan tarif yang proporsional dan akuntabel;
- b. bahwa memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/ PRT/ M/ 2006 tentang pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 01);
30. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 011);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan bangunan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, angka 15 dan angka 43 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinandan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan,perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
13. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
14. Pemanfaatan Bangunan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
16. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, bukti kepemilikan bangunan gedung dan/atau Persetujuan rencana teknis bongkar bangunan gedung;
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Koefisien adalah faktor pengali dalam sebuah ekspresi.
20. Koefisien Luas Bangunan adalah perbandingan antara luas total bangunan dibandingkan dengan luas lahan.
21. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis atau disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau.



26. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pulang Pisau.
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan Perundang - undangan  
Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan;
36. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
37. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
38. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya;
39. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
40. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi;

41. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi;
  42. Pemugaran bangunan gedung yang dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya;
  43. Pemutihan IMB adalah izin yang diberikan terhadap bangunan yang telah terbangun di kawasan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan/ atau Rencana Tata Ruang Kota.
  44. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
2. Ketentuan dalam BAB VIII Pasal 10 diubah, sehingga BAB VIII Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII  
HARGA SATUAN (TARIF) DAN RUMUS  
PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB**

**Bagian Pertama  
Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB**

**Pasal 10**

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
1.	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
	<b>a. Tempat Tinggal Hunian / Non Perumahan Kawasan Pemukiman</b>	15.000,-	m <sup>2</sup>

	<b>b. Tempat Usaha/Fungsi Khusus (Bangunan Budidaya Sarang Burung Walet)</b>	50.000,-	m <sup>2</sup>
	<b>c. Tempat Usaha / Range :</b>		
	- 0 s/d 10.000	30.000,-	m <sup>2</sup>
	- <10.000 s/d 20.000	25.000,-	m <sup>2</sup>
	- <20.000 s/d 30.000	20.000,-	m <sup>2</sup>
	- > 30.000	15.000,-	m <sup>2</sup>
	<b>d. Sosial / Budaya</b>	15.000,-	m <sup>2</sup>
	<b>e. Khusus</b>	15.000,-	m <sup>2</sup>
	<b>f. Ganda / Campuran</b>	20.000,-	m <sup>2</sup>
<b>2.</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>		
	a) Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman		
	- Pagar	3.000,-	m <sup>2</sup>
	- Tanggul/ <i>Retaining Wall</i>	3.000,-	m <sup>2</sup>
	- Turap Batas Kavling	3.000,-	m <sup>2</sup>
	- Dermaga	3.000,-	m <sup>2</sup>
	b) Konstruksi Penanda Masuk		
	- Gapura	500.000,-	Unit
	- Gerbang	500.000,-	Unit
	c) Konstruksi Perkerasan		
	- Jalan	1.500,-	m <sup>2</sup>
	- Lapangan Parkir	1.500,-	m <sup>2</sup>
	- Lapangan Upacara	1.500,-	m <sup>2</sup>
	- Lapangan Olahraga Terbuka	1.500,-	m <sup>2</sup>

	d) Konstruksi Penghubung		
	- Jembatan	75.000,-	m <sup>2</sup>
	- <i>Box Culvert</i>	75.000,-	m <sup>2</sup>
	- Titian	75.000,-	m <sup>2</sup>
	e) Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah		
	- Kolam Renang	15.000,-	m <sup>2</sup>
	- Kolam Pengolahan Air	15.000,-	m <sup>2</sup>
	- <i>Reservoir</i> Air Bawah Tanah	15.000	m <sup>2</sup>
	f) Konstruksi Menara		
	- Menara Antena	1,75 % dari harga kontrak pembuatan	Unit
	- Menara <i>Reservoir</i>	1,75 % dari harga kontrak pembuatan	Unit
	- Menara Telekomunikasi	1,75 % dari harga kontrak pembuatan (Minimal 3.000.000,)	Unit
	- Cerobong	1,75 % dari harga kontrak pembuatan	Unit
	g) Konstruksi Monumen		
	- Tugu	500.000,-	Unit
	- Patung	500.000,-	Unit
	h) Konstruksi Instalasi		
	- Instalasi Listrik	1000,-	m <sup>1</sup>
	- Instalasi Telepon dan	1000,-	m <sup>1</sup>

	Telekomunikasi		
	- Instalasi Pengolahan	1000,-	m <sup>1</sup>
	- Tiang Listrik	25.000,-	Unit
	- Tiang Telepon	15.000,-	Unit
	-		
	i) Konstruksi Reklame/ Papan Nama		
	- <i>Bilboard</i>	200.000,-	m <sup>2</sup>
	- Papan Iklan	200.000,-	m <sup>2</sup>
	- Papan Nama	200.000,-	m <sup>2</sup>

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 05 Nopember 2018

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 06 Nopember 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**SARIPUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2018 NOMOR...**

